



## Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Faktor Partisipasi, Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Swasta terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah

(Analysis of the Role of Local Government in Moderating Participation, Social, Economic, Environmental and Private Sector Factors Influencing Waste Management Policy)

Wahyudin Noor<sup>1</sup>, I Nyoman Sudyana<sup>2</sup>, Heriamariaty<sup>2</sup>, Johanna Maria Rotinsulu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana, Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111 Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>2</sup> Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111 Provinsi Kalimantan Tengah

\* Corresponding Author: [wahyudinnoo@gmail.com](mailto:wahyudinnoo@gmail.com)

### Article History

Received : June 20, 2026

Revised : June 25, 2026

Approved : June 26, 2026

### Keywords:

Waste Management; Local Government Role; Community Participation; Participatory Waste Management.

© 2026 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Forestry and Fisheries, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### Sejarah Artikel

Diterima : 20 Juni, 2026

Direvisi : 25 Juni, 2026

Disetujui : 25 Juni, 2026

### Kata Kunci:

Pengelolaan Sampah; Peran Pemerintah Daerah; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah Partisipatif

© 2026 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Kehutanan dan Perikanan Universitas Palangka Raya.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

### ABSTRACT

Waste management is part of the fifth mission of regional development, which emphasizes the importance of environmental conservation as the foundation of sustainable development. The environment is considered an essential component because the impacts of development accumulate over the long term. This study aims to analyze the role of local government in moderating participation, social, economic, environmental and private sector factors influencing waste management policy. A quantitative approach employing Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) was applied. The results indicate that community participation has a positive and significant effect on waste management policy ( $\beta = 0.428$ ;  $p < 0.001$ ), suggesting that higher community involvement enhances the effectiveness of waste management. Social factors also have a positive and significant influence ( $\beta = 0.337$ ;  $p = 0.001$ ), particularly through mutual cooperation and social support. Economic factors positively and significantly affect waste management policy ( $\beta = 0.301$ ;  $p = 0.001$ ) through economic benefits, waste banks, and recycling activities. Environmental factors exert the strongest influence ( $\beta = 0.486$ ;  $p < 0.001$ ) through increased environmental awareness. The private sector also has a positive and significant effect ( $\beta = 0.389$ ;  $p < 0.001$ ). Furthermore, local government significantly moderates the relationship between all variables and waste management policy ( $\beta = 0.514$ ;  $p < 0.001$ ), thereby strengthening the success of participatory waste management in East Barito Regency.

### ABSTRAK

Pengelolaan persampahan merupakan bagian dari misi kelima pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Lingkungan menjadi komponen penting karena dampak pembangunan akan terakumulasi dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam memoderasi faktor partisipasi, sosial, ekonomi, lingkungan dan swasta terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pengelolaan sampah ( $\beta=0,428$ ;  $p<0,001$ ), sehingga semakin tinggi keterlibatan masyarakat semakin efektif pengelolaan sampah. Faktor sosial juga berpengaruh positif dan signifikan ( $\beta=0,337$ ;  $p=0,001$ ), terutama melalui budaya gotong royong dan dukungan sosial. Faktor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan ( $\beta=0,301$ ;  $p=0,001$ ) melalui manfaat ekonomi, bank sampah, dan daur ulang. Faktor lingkungan memiliki pengaruh paling dominan ( $\beta=0,486$ ;  $p<0,001$ ) melalui peningkatan kesadaran lingkungan. Sektor swasta berpengaruh positif dan signifikan ( $\beta=0,389$ ;  $p<0,001$ ). Peran pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan seluruh variabel terhadap kebijakan pengelolaan sampah ( $\beta=0,514$ ;  $p<0,001$ ), sehingga memperkuat keberhasilan pengelolaan sampah berbasis partisipatif di Kabupaten Barito Timur.

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah dalam lingkup nasional juga merupakan isu strategis dalam pembangunan daerah sebab berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan urbanisasi telah menyebabkan meningkatnya timbulan sampah di berbagai daerah di Indonesia, sementara kapasitas pengelolaan sampah belum berkembang secara seimbang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2023).

Pembangunan daerah pada era desentralisasi menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah adalah persoalan sampah.

Kerangka hukum pengelolaan sampah secara nasional telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Undang-undang ini juga secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor utama dalam pengurangan dan penanganan sampah, termasuk dalam pemberian saran, pertimbangan dan pengawasan kebijakan pengelolaan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008).

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pokok isi Perpres ini yaitu mengatur penanganan sampah perkotaan

dengan pendekatan *waste-to-energy* (sampah diproses menjadi energi terbarukan) menggunakan teknologi ramah lingkungan, menetapkan kriteria teknis dan persyaratan operasional untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, bioenergi, bahan bakar terbarukan dan produk turunan lainnya dan menyediakan kerangka investasi, tata kelola dan perizinan yang lebih sederhana serta fokus pada pemanfaatan teknologi modern. Perpres ini tidak menggantikan UU dasar pengelolaan sampah (UU 18/2008), tetapi menjadi kebijakan pelaksana yang menguatkan arah pengelolaan sampah modern dan inovatif di tingkat nasional.

Pengelolaan persampahan menjadi bagian dari misi kelima pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan dipandang sebagai komponen penting yang memerlukan perhatian karena dampak pembangunan akan terakumulasi dalam jangka panjang. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi, sampah dan limbah yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas. Namun demikian pada saat ini Pemerintah Daerah Barito Timur belum memiliki Rencana Induk

Pengelolaan Sampah yang harus dibuat untuk menjadi acuan dalam penegelolaan sampah di Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 6 ayat (1): Pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun rencana induk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga. dan Pasal 6 ayat (2): Rencana induk tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di daerah. Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill dan belum tersedianya Tempat Pemilahan Sampah 3 R secara merata di setiap kelurahan dan setiap desa.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Timur secara umum telah diatur sebagaimana pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu melalui berbagai kebijakan nasional yang menekankan pendekatan *reduce, reuse, recycle* (3R) dan pelibatan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah serta tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan aktif masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah cenderung tidak efektif dan berkelanjutan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa persoalan persampahan di Kabupaten Barito Timur bukan semata-mata teknis infrastruktur, tetapi juga terkait tata kelola, kesadaran masyarakat dan partisipasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta. Oleh sebab itu, model pengelolaan sampah yang berbasis pembangunan berkelanjutan dan collaborative governance menjadi penting untuk menjawab tantangan kompleks ini. (Aziz et al., 2022).

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pengelolaan sampah. Model partisipasi yang tepat perlu mempertimbangkan

karakteristik sosial budaya lokal, tingkat pendidikan, struktur ekonomi, serta pola permukiman di Kabupaten Barito Timur. Di wilayah yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan, pendekatan partisipatif juga harus melibatkan pihak perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).

Pendekatan pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan daur ulang, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi alternatif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; Persepsi responden terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah daerah; Faktor sosial yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah; Faktor ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi; Kondisi lingkungan yang memengaruhi praktik pengelolaan sampah di masyarakat. Peran sektor swasta dalam mendukung pengelolaan sampah; Peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, koordinator, motivator, serta pelaksana monitoring dan evaluasi; Praktik masyarakat dalam melakukan pengurangan, pemilahan, pemanfaatandan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. SPSS (*Statistical Package for the Social*

*Sciences*): memastikan kualitas dan kelayakan data.

### 3. Hasil Penelitian

#### 3.1. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ( $\beta = 0,428$ ;  $t = 3,985$ ;  $p < 0,05$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Menurut teori partisipasi masyarakat Arnstein, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah, gotong royong, program pemerintah, dan aktivitas bank sampah. Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh indikator partisipasi, yang menunjukkan adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah.

Hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator “Saya ikut program pemerintah” memiliki nilai loading factor tertinggi (0,846), diikuti indikator “Saya ikut kegiatan pengelolaan sampah” (0,821). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program pemerintah merupakan faktor dominan dalam membentuk partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menegaskan pentingnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik.

Nilai Cronbach Alpha (0,902), Composite Reliability (0,924), dan AVE (0,669) menunjukkan bahwa konstruk partisipasi masyarakat memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,861 menunjukkan bahwa

model penelitian memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kebijakan pengelolaan sampah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yunita (2024), Basalamah (2025), dan Halimah (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui bank sampah, program 3R, dan berbagai kegiatan lingkungan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat tidak hanya mendorong pengurangan timbulan sampah, tetapi juga membangun kesadaran lingkungan, rasa memiliki terhadap program, dan perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keberhasilan Program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Temuan ini memperkuat konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, pengembangan bank sampah, dan penguatan budaya gotong royong guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis partisipatif.

#### 3.2. Faktor Sosial Berpengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ( $\beta = 0,337$ ;  $t = 3,412$ ;  $p = 0,001$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi sosial masyarakat, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Faktor sosial dalam penelitian ini meliputi dukungan lingkungan sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, budaya gotong

royong, dan hubungan sosial masyarakat. Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh indikator, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur masih memiliki modal sosial yang kuat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Temuan ini sejalan dengan teori modal sosial Putnam yang menegaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan nilai kebersamaan mampu memperkuat kerja sama masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

Hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator “Budaya gotong royong masih ada” memiliki nilai loading factor tertinggi (0,844), diikuti indikator “Lingkungan mendukung pengelolaan sampah” (0,808). Hal ini menunjukkan bahwa budaya gotong royong dan dukungan sosial merupakan faktor utama yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Nilai *Cronbach Alpha* (0,873), *Composite Reliability* (0,911), dan *AVE* (0,702) menunjukkan bahwa konstruk faktor sosial memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas.

Temuan penelitian ini didukung oleh Rahman dan Syafaatunnisa (2024), Basalamah (2025), Halimah (2025), Amir, Miru dan Sabara (2025), serta Yunita (2024) yang menyatakan bahwa hubungan sosial yang baik, budaya gotong royong, dukungan tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial yang peduli terhadap kebersihan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah. Tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program lingkungan.

Dengan demikian, faktor sosial merupakan salah satu determinan penting keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini memperkuat konsep *social capital* dan *collaborative governance* yang menekankan pentingnya hubungan sosial, budaya kolektif, dan kerja sama multipihak dalam mendukung kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu

memperkuat budaya gotong royong, melibatkan tokoh masyarakat, serta meningkatkan edukasi dan kegiatan sosial berbasis lingkungan guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

### 3.3. Faktor Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, variabel faktor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,301, t-statistik 3,108, dan p-value 0,001 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi ekonomi masyarakat dan semakin besar manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan sampah, maka semakin efektif implementasi kebijakan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan teori pilihan rasional yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mendukung program yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

Faktor ekonomi dalam penelitian ini mencakup manfaat ekonomi dari sampah, insentif, keterjangkauan biaya pengelolaan sampah, dan peningkatan pendapatan melalui daur ulang. Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh indikator tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator “Ada manfaat ekonomi dari sampah” memiliki nilai loading factor tertinggi (0,892), diikuti indikator “Daur ulang meningkatkan pendapatan” (0,861). Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa variabel faktor ekonomi memenuhi kriteria reliabel dan valid (*Cronbach Alpha* = 0,881; *Composite*

Reliability = 0,918; AVE = 0,736). Nilai R-Square sebesar 0,861 menunjukkan bahwa faktor ekonomi bersama variabel lain mampu menjelaskan 86,1% variasi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi, insentif, dan program bank sampah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program bank sampah, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan sampah, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan dan mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih baik. Demikian pula, penerapan prinsip ekonomi sirkular dan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) terbukti mampu menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Dengan demikian, faktor ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Semakin besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat, semakin tinggi dukungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan ekonomi melalui pengembangan bank sampah, pemberian insentif, pelatihan daur ulang, pemberdayaan UMKM berbasis sampah, dan penerapan ekonomi sirkular guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

### 3.4. Faktor Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, variabel faktor lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,486, t-statistik 4,521, dan p-value 0,000 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah terhadap kesehatan dan

lingkungan, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku lingkungan yang menyatakan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, persepsi, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Faktor lingkungan dalam penelitian ini meliputi persepsi masyarakat mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, pentingnya pengelolaan sampah bagi keberlanjutan lingkungan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap seluruh indikator, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kesadaran lingkungan yang cukup baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat memahami bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator “Sampah berdampak pada kesehatan” memiliki nilai loading factor tertinggi (0,918), diikuti indikator “Saya peduli lingkungan” (0,901). Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap dampak sampah dan kepedulian lingkungan merupakan faktor utama yang membentuk variabel lingkungan. Selain itu, hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa variabel faktor lingkungan memenuhi kriteria reliabel dan valid (Cronbach Alpha = 0,926; Composite Reliability = 0,941; AVE = 0,799). Nilai R-Square sebesar 0,861 menunjukkan bahwa faktor lingkungan bersama variabel lain mampu menjelaskan 86,1% variasi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang memahami dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan cenderung lebih aktif melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Program

edukasi lingkungan, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta kegiatan bank sampah juga terbukti efektif dalam meningkatkan kepedulian dan perilaku ramah lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, faktor lingkungan memiliki pengaruh paling kuat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan pentingnya menjaga lingkungan, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi lingkungan, pengembangan program 3R, bank sampah, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

### 3.5. Peran Sektor Swasta Berpengaruh Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, variabel peran sektor swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,389, t-statistik 3,764, dan p-value 0,000 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan sektor swasta, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan lingkungan.

Peran sektor swasta dalam penelitian ini meliputi keterlibatan perusahaan dalam pengelolaan sampah, dukungan program CSR, edukasi lingkungan, serta bantuan fasilitas pengelolaan sampah. Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh indikator tersebut, yang menunjukkan bahwa masyarakat memandang sektor swasta sebagai mitra penting dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), yang menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai

pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hasil uji *outer model* menunjukkan bahwa indikator “Perusahaan membantu fasilitas” memiliki nilai *loading factor* tertinggi (0,891), diikuti indikator “Program CSR mendukung” (0,864). Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan fasilitas dan program CSR merupakan bentuk kontribusi sektor swasta yang paling dirasakan masyarakat. Selain itu, hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa variabel peran sektor swasta memenuhi kriteria reliabel dan valid (*Cronbach Alpha* = 0,904; *Composite Reliability* = 0,926; *AVE* = 0,759). Nilai *R-Square* sebesar 0,861 menunjukkan bahwa peran sektor swasta bersama variabel lain mampu menjelaskan 86,1% variasi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui penyediaan fasilitas, pendanaan, program CSR, edukasi lingkungan, dan dukungan terhadap bank sampah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Selain memperkuat kapasitas pemerintah daerah, sektor swasta juga berperan dalam mendorong inovasi, penerapan ekonomi sirkular, serta pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Kerja sama pemerintah dan sektor swasta juga dapat mempercepat penyediaan sarana, teknologi, dan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran sektor swasta memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Semakin besar dukungan sektor swasta dalam bentuk fasilitas, edukasi, program CSR, dan pemberdayaan masyarakat, semakin efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta melalui pengembangan program CSR lingkungan, dukungan terhadap bank sampah, penerapan ekonomi sirkular, dan inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Pemerintah daerah berperan secara signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Timur melalui pelaksanaan fungsi regulasi fasilitasi koordinasi implementasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan peraturan daerah serta program strategis yang menjadi landasan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah daerah juga menyediakan sarana dan prasarana persampahan berupa tempat penampungan sementara armada pengangkut sampah kontainer sampah fasilitas pengolahan sampah dan tempat pemrosesan akhir untuk mendukung pelayanan persampahan yang optimal. Selain itu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan melaksanakan memantau dan mengevaluasi seluruh tahapan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan pengangkutan pengolahan hingga pemrosesan akhir. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penerapan prinsip *reduce reuse and recycle* (3R). Di samping itu pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan sektor swasta lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat tata kelola persampahan. Dengan demikian keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Timur sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya memperkuat kolaborasi multipihak serta menerapkan prinsip tata kelola lingkungan yang efektif efisien partisipatif dan berkelanjutan.

#### Ucapan Terima Kasih

Bagian ini merupakan opsional, disampaikan kepada organisasi yang membantu pendanaan beserta skema dan nomor hibah, maupun personel teknis yang membantu dalam penelitian. Ucapan terima kasih juga berlaku untuk personel yang membantu bahan penelitian, keahlian, waktu selama penelitian tetapi tidak sebagai penulis.

#### Daftar Pustaka

- Arnstein, Sherry R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aziz, dkk. (2022). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis pembangunan berkelanjutan*. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman].
- Basalamah. (2025). *Pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat*. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman].
- Durkheim, Émile. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1893).
- Edward III, George C.. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, Imam. (2021). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0* (Edisi terbaru). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J., & Anderson, Rolph E.. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hair, Joseph F., Hult, G. Tomas M., Ringle, Christian M., & Sarstedt, Marko. (2017). *A primer on partial least squares*

*structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.

*melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Halimah. (2025). *Penguatan kesadaran lingkungan melalui program 3R dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat*. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman].

[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan \(KLHK\)](#). (2023). *Data dan informasi pengelolaan sampah nasional tahun 2023*. Jakarta: KLHK.

Putnam, Robert D.. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Rahman., & Syafaatunnisa. (2024). *Peran modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas*. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman].

Santoso, Singgih. (2018). *Konsep dasar dan aplikasi SEM dengan SmartPLS*. Elex Media Komputindo.

Yunita. (2024). *Efektivitas program bank sampah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran lingkungan*. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan*